

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Good Governance Government adalah pemerintahan yang paling diimpikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dimana pemerintahannya berjalan dengan baik tanpa adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh pejabat daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab.

Baik tidaknya pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah dapat dilihat dari kualitas laporan keuangannya, semakin baik pengelolaan keuangan pemerintahan maka kualitas laporan keuangan pun akan meningkat. Oleh karena itu pada saat proses pengelolaan keuangan diadakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Pada Undang Undang

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa pada saat proses pemeriksaan, BPK memiliki wewenang untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk diperiksa dan hasil dari pemeriksaannya harus ditindak lanjuti, sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut.

Pada saat melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan selalu memberikan opini untuk mengelompokkan Laporan Keuangan mana saja yang telah memiliki informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Opini yang diberikan oleh BPK untuk Laporan Keuangan yang telah diperiksanya adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WDP (Wajar Dengan Pengecualian), TW (Tidak Wajar) serta TMP (Tidak Memberikan Pendapat/Disclaimer).

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah perlu menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dijelaskan bahwa, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan atas kegiatan pemerintah. Sistem pengendalian intern pemerintah memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan

penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap undang-undang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diterapkan guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang kemudian dapat menurunkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, Pemerintah juga perlu menerapkan Akuntabilitas Publik dalam penyusunan laporan keuangan. Dimana Akuntabilitas Publik merupakan Suatu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Entitas Pelaporan terhadap pengelolaan keuangan serta pelaksanaan kebijakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sehingga dengan adanya akuntabilitas publik pemerintah daerah dan pusat wajib mempertanggungjawabkan segala aktivitas dalam pengelolaan keuangan daerah dengan memberikan hasil yang baik tidak hanya dalam bentuk laporan keuangan tetapi dengan adanya bukti secara fisik di wilayah kota/provinsi.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017, BPK memeriksa 537 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016. Dari pemeriksaan yang dilakukan BPK memberikan opini WTP atas 375 LKPD (70%), opini WDP atas 139 LKPD (26%), dan opini TMP atas 23 LKPD (4%). Berdasarkan tingkat Pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 31 dari 34 Pemerintah Provinsi, 272 dari 415 Pemerintah Kabupaten dan 72 dari 93 Pemerintah Kota.

Apabila dilihat secara lebih menyeluruh, opini LKPD dalam 6 tahun terakhir (2011-2016) mengalami perbaikan. Hal itu dapat dilihat dari tabel 1.1 yang diambil dari *website* BPK dan diringkas kembali oleh penulis. Berikut adalah tabel yang menggambarkan perkembangan opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi dari Tahun 2011-2016.

TAHUN	OPINI BPK								JUMLAH
	WTP	PERSENTASE	WDP	PERSENTASE	TMP	PERSENTASE	TW	PERSENTASE	
2011	67	13%	349	67%	100	19%	8	1%	524
2012	120	23%	319	61%	79	15%	6	1%	524
2013	156	30%	311	59%	46	9%	11	2%	456
2014	251	50%	230	46%	19	4%	4	1%	504
2015	312	58%	187	36%	30	5%	4	1%	533
2016	375	70%	139	26%	23	4%			537

(sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017)

Tabel 1. 1 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2011-2016

Perkembangan opini pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini terjadi karena Pemerintah Daerahnya terus melakukan perbaikan atas temuan dari BPK dan menindaklanjuti rekomendasi dari BPK sehingga kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terus meningkat.

Meskipun secara umum Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengalami peningkatan, masih ada beberapa LKPD yang mengalami penurunan opini, yakni Kabupaten Bengkulu Tengah, Kepahiang, Tanggamus, Kebumen, Klaten, Manado, Jember, Gorontalo Utara, Nias Barat, dan sebagainya. Selain itu, masih ada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang masih mendapatkan opini TMP (Disclaimer). Hal ini menunjukkan bahwa masih ada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

yang belum berkualitas dan perlu melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangannya.

Berdasarkan hasil dari pemeriksaan, BPK mengungkapkan terdapat permasalahan kelemahan SPI dan ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kelemahan SPI tersebut meliputi antara lain kebijakan akuntansi untuk penerapan SAP berbasis akrual belum memadai, inkonsistensi penggunaan tarif pajak yang dapat mengakibatkan kehilangan penerimaan negara dan kelemahan SPI lainnya pada persediaan, piutang, aset tetap, aset tak berwujud, kewajiban serta penyajian laporan perubahan ekuitas dan laporan operasional. (sumber: www.bpk.go.id)

Selain itu, BPK menemukan adanya kurang salur dana BOS Pusat dikarenakan pengajuannya terlambat. Menurut Moermahadi, masih ada yang harus diperbaiki Pemprov Jawa Barat dalam LKPD-nya. Ia juga menyebutkan aset yang sudah dibeli (oleh Pemprov Jabar) harus jelas penggunaannya. BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (sumber: www.monitor.co.id)

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengungkapkan, temun pertama adalah mengenai sistem informasi penyusunan LKPP tahun 2016 yang belum terintegrasi, kedua pelaporan saldo anggaran lebih (SAL) serta pengendalian piutang pajak dan penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga atau denda belum memadai, ketiga penatausahaan persediaan, aset tetap, dan aset tak berwujud belum tertib, keempat pengendalian atas

pengelolaan program subsidi kurang memadai, kelima pertanggungjawaban kewajiban pelayanan public kereta api belum jelas, keenam penganggaran dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang sarana prasarana penunjang dan tambahan DAK yang dianggap belum memadai, ketujuh temuan mengenai tindakan khusus penyelesaian aset negatif dana jaminan social kesehatan yang dianggap belum jelas, pengembalian pajak tahun 2016 tidak memperhitungkan sebagian piutang pajaknya, pengelolaan hibah langsung berupa uang, barang dan jasa yang tidak sesuai keuntungan, penganggaran pelaksanaan belanja tidak sesuai dengan ketentuan dan penatausahaan utang belum memadai, serta terdapat beberapa temuan lain mengenai pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPP Tahun 2016. (sumber: EWS.com)

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang ada pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disebabkan oleh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Akuntabilitas Publik yang kurang memadai. Sehingga menyebabkan turunnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berikut adalah beberapa peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian mengenai Kualitas Laporan Keuangan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wenda Pregiwa (2013) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian

internal pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Febrian Cahyo Pradono dan Basukianto (2015) menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Rekonsiliasi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayu Wulandari (2014) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Robert O. Opanyi (2016) menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Sektor Publik berbasis Internasional (IPSAS) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Tuti Herawati (2014) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Nunuy Nur Afifah dan Dien Noviany Rahmatika (2014) menunjukkan bahwa Kompetensi Aparat dan Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Dadang Suwanda (2015) menunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, dan Pemanfaatan

Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Harry Wibawa (2015) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Joseph Babatunde Akeju dan Ahmed Adeshina Babatunde (2017) menunjukkan bahwa Tata Kelola Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Penelitian ini merupakan Replikasi dari penulis yang melakukan penelitian yang sama yakni, Penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Penelitian tersebut dilakukan oleh Harry Wibawa (2015). Namun, terdapat perbedaan lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian, pada penelitian yang dilakukan oleh Harry Wibawa dilakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Sementara pada penelitian ini akan dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan teori dan uraian di atas serta didukung dengan fakta-fakta yang ada, penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam tentang “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Akuntabilitas Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Barat”. (Penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat serta Inspektorat Provinsi Jawa Barat).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang teruraikan di atas dapat dikemukakan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Jawa Barat
2. Bagaimana Akuntabilitas Publik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Bagaimana kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Seberapa besar pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Seberapa besar akuntabilitas publik terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6. Seberapa besar pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan akuntabilitas publik terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mngetahui bagaimana Akuntabilitas Publik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Akuntabilitas Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Aspek Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan data empiris dalam ilmu akuntansi sektor publik terutama dalam bahasan tentang Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas Publik dan Laporan Keuangan Pemerintahan.

1.4.2 Aspek Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Inspektorat Provinsi Jawa Barat untuk dijadikan masukan dan pertimbangan bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat guna meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan.

1.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Penyusunan skripsi ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berlokasi di Jalan Diponegoro No.22, Citarum serta Inspektorat Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Surapati No.4 Citarum. Penulisan kajian skripsi ini dimulai pada bulan Maret 2017 hingga selesai.

